

Peran Sekolah dalam Sosialisasi dan Fasilitasi Kartu Identitas Anak: Studi Literasi Administrasi Kependudukan sebagai Bagian Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Bogor

Mohamad Iqbal Al Ma'muri¹, Edy Sutrisno²

Politeknik STIA LAN Jakarta

Correspondent Author: 2342021056@stialan.ac.id

N

Naskah diterima tanggal 11 September 2025, direvisi akhir tanggal 10 November 2025, disetujui tanggal 15 November 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran sekolah sebagai agen literasi administrasi kependudukan dalam mendukung kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bogor. Meskipun KIA merupakan identitas resmi yang penting untuk akses layanan pendidikan dan kesehatan, kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor baru mencapai 37,52%, jauh di bawah rata-rata Jawa Barat (58,35%). Penelitian kualitatif deskriptif ini melibatkan 12 informan dari Disdukcapil, sekolah, akademisi, dan masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sekolah belum optimal menjalankan fungsi edukatif dalam literasi administrasi kependudukan, dengan pemahaman komunitas sekolah tentang manfaat KIA masih rendah, integrasi KIA dalam sistem administrasi sekolah minimal, dan program sosialisasi terfragmentasi. Penelitian ini mengidentifikasi empat hambatan utama: (1) belum terintegrasinya literasi administrasi kependudukan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, (2) rendahnya pemahaman tenaga pendidik tentang pentingnya KIA, (3) keterbatasan kolaborasi sekolah-pemerintah daerah, dan (4) disparitas akses layanan antarwilayah. Novelty penelitian terletak pada perspektif pendidikan transformatif yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan sosial dalam literasi administrasi kependudukan. Strategi rekomendasi meliputi integrasi literasi administrasi kependudukan dalam pembelajaran PKn, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan, pelembagaan kolaborasi sekolah-Disdukcapil, dan pengembangan ekosistem digital ramah sekolah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan kewarganegaraan kontekstual dan praktik literasi administrasi kependudukan berbasis sekolah untuk mendukung pemenuhan hak identitas anak secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Literasi administrasi kependudukan, Pendidikan kewarganegaraan, Peran sekolah, Kartu Identitas Anak, Kolaborasi sekolah-pemerintah*

How to cite (APA Style): Al Ma'muri, M. I., & Sutrisno, E. (2025). Peran sekolah dalam sosialisasi dan fasilitasi kartu identitas anak: Studi literasi administrasi kependudukan sebagai bagian pendidikan kewarganegaraan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 25(3), 408–416. doi:<https://doi.org/10.17509/jpp.v25i3.92038>

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hak dan kewajiban warga negara sejak usia dini. Dalam konteks Indonesia, literasi administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dari pendidikan kewarganegaraan yang sering terabaikan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Kartu Identitas Anak (KIA), yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 sebagai identitas resmi bagi anak usia 0-17 tahun, tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tetapi juga sebagai instrumen pedagogis untuk memperkenalkan anak pada konsep kewarganegaraan, hak sipil, dan tanggung jawab administratif. Namun demikian, implementasi kebijakan KIA di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga sosial-kultural dan pendidikan, sehingga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai institusi, termasuk sekolah sebagai agen sosialisasi primer.

Kabupaten Bogor menghadapi permasalahan serius dalam capaian kepemilikan KIA, dengan tingkat kepemilikan baru mencapai 37,52% pada tahun 2024, menempatkan daerah ini pada peringkat ke-24 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024). Angka ini jauh tertinggal dari rata-rata provinsi sebesar 58,35% dan bahkan lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga seperti Kota Bogor (55,91%), Kabupaten Bekasi (61,05%), Kota Bekasi (73,22%), dan Kota Depok (81,29%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa 1.024.834 anak atau 62,48% dari total populasi anak di Kabupaten Bogor belum memiliki

identitas resmi, yang berimplikasi pada akses terbatas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tren capaian kepemilikan KIA periode 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan persentase 22,42% (2020), 38,46% (2021), 24,58% (2022), 28,48% (2023), dan 37,52% (2024), mencerminkan inkonsistensi implementasi program dan belum adanya strategi sistematis berbasis institusi pendidikan. Disparitas geografis juga sangat mencolok, dengan beberapa kecamatan seperti Kemang (58,13%), Sukaraja (57,20%), dan Ciomas (54,28%) mencatat capaian relatif tinggi, sementara kecamatan terpencil seperti Sukamakmur (10,71%), Sukajaya (13,90%), dan Cigudeg (17,21%) berada pada posisi terendah (Disdukcapil Kabupaten Bogor, 2024).

State-of-the-Art Riset Terdahulu

Literatur tentang peran sekolah dalam literasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas, meskipun riset tentang pendidikan kewarganegaraan sudah berkembang pesat. Studi tentang civic literacy umumnya fokus pada dimensi politik dan demokrasi (Westheimer & Kahne, 2004; Banks, 2017), namun jarang mengeksplorasi literasi administrasi kependudukan sebagai komponen esensial citizenship education. Penelitian Ardina et al. (2025) mengidentifikasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait KIA di Rantau Rasau, namun tidak menganalisis peran institusi pendidikan dalam membangun kesadaran tersebut. Marlisa dan Wijaya (2021) meneliti kesadaran hukum masyarakat tentang KIA di Desa Jabontegal dan menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman manfaat KIA menjadi hambatan utama, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana sekolah dapat menjadi agen perubahan sosial dalam konteks ini.

Riset kolaborasi sekolah-pemerintah dalam implementasi kebijakan publik menunjukkan hasil positif ketika dirancang secara sistematis. Studi Epstein et al. (2018) tentang school-family-community partnerships mengidentifikasi bahwa kolaborasi efektif meningkatkan partisipasi orang tua dan outcomes siswa. Dalam konteks Indonesia, penelitian Nugroho (2021) menganalisis kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman dengan fokus pada dimensi SERVQUAL, namun tidak mengintegrasikan perspektif pendidikan atau peran sekolah. Penelitian tentang transformasi digital dalam layanan publik (Mergel et al., 2019; OECD, 2020) menekankan pentingnya literasi digital, namun belum mengeksplorasi bagaimana institusi pendidikan dapat memfasilitasi adopsi teknologi administrasi kependudukan di kalangan masyarakat. Studi Handayani et al. (2024) dan Verástegui et al. (2025) menggunakan Technology Acceptance Model untuk menganalisis penerimaan layanan publik digital, namun tidak mempertimbangkan peran mediasi sekolah dalam meningkatkan perceived usefulness dan perceived ease of use di kalangan orang tua siswa.

Riset tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia cenderung fokus pada pembelajaran nilai dan sikap demokratis (Winataputra, 2015; Budimansyah, 2019), namun belum mengeksplorasi dimensi praktis seperti literasi administrasi kependudukan. Pendekatan critical civic education yang dikembangkan oleh Westheimer dan Kahne (2004) menekankan pentingnya mempersiapkan siswa sebagai justice-oriented citizens yang memahami hak dan kewajibannya, namun implementasi di Indonesia belum mencakup literasi administrasi kependudukan secara eksplisit. Konsep transformative pedagogy dalam pendidikan kewarganegaraan (Banks, 2017; Freire, 2018) menekankan peran sekolah sebagai agen perubahan sosial, namun aplikasinya dalam konteks administrasi kependudukan belum dieksplorasi secara sistematis. Demikian pula, literatur tentang school-based social services (Dryfoos, 1994; Adelman & Taylor, 2006) mengidentifikasi potensi sekolah sebagai hub untuk layanan publik, namun implementasinya dalam konteks administrasi kependudukan di negara berkembang masih sangat minim.

Research Gap Analysis

Berdasarkan kajian literatur di atas, penelitian ini mengidentifikasi empat research gap yang signifikan. Pertama, belum ada studi yang secara komprehensif menganalisis peran sekolah sebagai agen literasi administrasi kependudukan dalam konteks implementasi kebijakan KIA. Riset sebelumnya cenderung memisahkan kajian administrasi publik dari perspektif pendidikan, sehingga mengabaikan potensi institusi pendidikan sebagai enabler implementasi kebijakan. Kedua, literatur pendidikan kewarganegaraan belum mengintegrasikan literasi administrasi kependudukan sebagai komponen esensial civic education, meskipun pemahaman tentang hak sipil dan identitas merupakan fondasi citizenship yang kuat. Ketiga, riset tentang kolaborasi sekolah-pemerintah dalam implementasi kebijakan publik masih sangat terbatas di Indonesia, khususnya dalam konteks administrasi kependudukan, padahal partnership semacam ini terbukti efektif di negara-negara maju. Keempat, belum ada studi yang mengeksplorasi bagaimana disparitas geografis dan karakteristik komunitas sekolah memengaruhi efektivitas sosialisasi dan fasilitasi KIA, sehingga strategi yang dikembangkan cenderung one-size-fits-all dan kurang responsif terhadap konteks lokal.

Novelty Penelitian

Novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengembangkan perspektif pendidikan transformatif dalam literasi administrasi kependudukan, dengan menempatkan sekolah sebagai agen perubahan sosial dan memposisikan kepemilikan KIA bukan sekadar target administratif tetapi sebagai outcomes pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis yang selama ini berkembang secara terpisah, yaitu transformative civic education, school-community partnership, dan technology acceptance model, untuk menganalisis fenomena kepemilikan KIA secara holistik dari perspektif pendidikan. Ketiga, penelitian ini menghasilkan model literasi administrasi kependudukan berbasis sekolah yang spesifik untuk konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan disparitas geografis, variasi kapasitas komunitas sekolah, dan karakteristik sosial-kultural lokal. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperluas diskursus pendidikan kewarganegaraan dengan memasukkan dimensi literasi administrasi kependudukan sebagai komponen esensial, sementara kontribusi praktis adalah menyediakan blueprint kolaborasi sekolah-pemerintah yang aplikatif untuk meningkatkan kepemilikan KIA secara inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan research gap dan novelty yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran sekolah dalam sosialisasi dan fasilitasi kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor dari perspektif pendidikan transformatif.
2. Merumuskan model literasi administrasi kependudukan berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kepemilikan KIA secara inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis untuk memahami kompleksitas peran sekolah dalam literasi administrasi kependudukan. Desain penelitian bersifat studi kasus instrumental dengan Kabupaten Bogor sebagai lokus penelitian, dipilih berdasarkan pertimbangan capaian kepemilikan KIA yang rendah (37,52%) dan disparitas geografis yang signifikan antarwilayah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang dipilih secara purposive, meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tim Substansi Identitas Penduduk, Tim SIAK, Tim Kerjasama dan Inovasi, operator kecamatan, operator UPT Dukcapil, Bappedalitbang, kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, akademisi, dan dua orang tua siswa. Triangulasi data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan KIA di

sekolah dan kantor Disdukcapil, serta analisis dokumen kebijakan, data capaian KIA, dan dokumen administrasi sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi temuan. Kredibilitas penelitian dijaga melalui member checking, peer debriefing, dan triangulasi sumber serta metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sekolah dalam Literasi Administrasi Kependudukan: Praktik Saat Ini

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah di Kabupaten Bogor belum optimal menjalankan fungsi edukatif dalam literasi administrasi kependudukan. Kepala sekolah SMP yang diwawancarai menyatakan bahwa pemahaman komunitas sekolah tentang pentingnya KIA masih sangat terbatas, dengan KIA sering dipandang sebagai dokumen opsional yang tidak memiliki urgensi setara dengan dokumen pendidikan seperti rapor atau ijazah (P9). Kepala sekolah SD mengakui bahwa meskipun pihak sekolah mendukung program sosialisasi KIA dari Disdukcapil, integrasi KIA dalam sistem administrasi sekolah masih minimal dan belum menjadi bagian dari prosedur penerimaan siswa baru secara konsisten (P8). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekolah belum menempatkan literasi administrasi kependudukan sebagai bagian integral dari misi pendidikan kewarganegaraan, sehingga sosialisasi yang dilakukan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Dari perspektif transformative pedagogy (Banks, 2017), temuan ini mencerminkan missing link antara civic education dan practical citizenship. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki potensi unik untuk mentransformasi pemahaman siswa dan orang tua tentang hak sipil melalui pembelajaran kontekstual dan experiential learning, namun potensi ini belum termanfaatkan secara optimal dalam kasus KIA. Pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih dominan berorientasi pada pengetahuan konseptual tentang demokrasi dan konstitusi, namun kurang menekankan dimensi praktis seperti pemahaman tentang identitas hukum, dokumen kependudukan, dan hak administratif anak. Hal ini sejalan dengan kritik Westheimer dan Kahne (2004) terhadap civic education yang lebih menekankan personally responsible citizen daripada justice-oriented citizen yang memahami hak-haknya dan mampu mengadvokasi perubahan sistemik. Ketika pendidikan kewarganegaraan tidak menghubungkan konsep abstrak citizenship dengan praktik konkret seperti kepemilikan identitas resmi, maka pembelajaran menjadi decontextualized dan kurang bermakna bagi siswa.

Program jemput bola yang dilakukan Disdukcapil ke sekolah menunjukkan variasi signifikan dalam hal cakupan dan kualitas layanan. Beberapa sekolah menerima layanan penuh dengan sosialisasi intensif dan fasilitasi pembuatan KIA di tempat, sementara sekolah lain, terutama di wilayah terpencil, belum pernah menerima kunjungan sama sekali (P9). Kepala UPT Wilayah I menjelaskan bahwa keterbatasan personil dan volume berkas yang tinggi menyebabkan layanan kolektif memerlukan waktu lebih lama, sehingga tidak semua sekolah dapat dilayani secara merata (P6). Akademisi yang diwawancarai menekankan bahwa ketidakmerataan akses ini menciptakan disparitas struktural dalam pemenuhan hak identitas anak, di mana siswa di sekolah perkotaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh KIA dibandingkan siswa di wilayah terpencil (P10). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip equity dalam pendidikan yang menekankan bahwa semua anak berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dasar, termasuk identitas resmi, terlepas dari lokasi geografis sekolah mereka.

Hambatan Struktural: Kurikulum, Kapasitas Guru, dan Kolaborasi Institusional

Analisis kurikulum menunjukkan bahwa literasi administrasi kependudukan belum terintegrasi secara eksplisit dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, baik di tingkat

SD maupun SMP. Kompetensi dasar yang ada fokus pada pemahaman nilai-nilai Pancasila, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia dalam dimensi filosofis, namun tidak mencakup aspek praktis seperti pemahaman tentang dokumen kependudukan dan prosedur administratif. Kepala sekolah SMP menyatakan bahwa guru PKn tidak memiliki panduan khusus atau modul pembelajaran tentang administrasi kependudukan, sehingga topik ini jarang dibahas dalam pembelajaran kecuali ada inisiatif personal dari guru (P9). Hal ini mengindikasikan bahwa literasi administrasi kependudukan masih berada di luar mainstream kurikulum pendidikan kewarganegaraan, meskipun pemahaman tentang identitas hukum dan hak administratif merupakan foundational knowledge untuk citizenship yang efektif.

Temuan ini memiliki implikasi teoretis penting terhadap konsep civic literacy dalam konteks Indonesia. Literatur tentang civic literacy (Bennett et al., 2009; Levine, 2011) umumnya menekankan pengetahuan tentang institusi politik, proses demokrasi, dan partisipasi politik, namun kurang memperhatikan dimensi administrative citizenship yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban administratif warga negara. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, administrative citizenship menjadi sangat krusial karena akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum sangat bergantung pada kepemilikan dokumen identitas resmi. Ketika kurikulum pendidikan kewarganegaraan mengabaikan dimensi ini, maka gap antara civic education dan civic practice menjadi semakin lebar, menghasilkan lulusan yang mungkin memahami konsep demokrasi secara teoretis namun tidak equipped dengan pengetahuan praktis untuk mengakses hak-hak sipil mereka.

Kapasitas guru dalam mengajarkan literasi administrasi kependudukan juga menjadi hambatan signifikan. Akademisi menjelaskan bahwa sebagian besar guru PKn tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang administrasi kependudukan atau regulasi terkait KIA, sehingga mereka sendiri tidak memiliki pemahaman mendalam tentang topik ini untuk dapat mengajarkannya secara efektif (P10). Ketika Disdukcapil melakukan sosialisasi di sekolah, guru cenderung berperan sebagai fasilitator logistik daripada co-educator yang dapat memperkuat pesan sosialisasi melalui pembelajaran di kelas. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan dalam pengembangan profesional guru yang belum mencakup knowledge dan skills untuk mengajarkan dimensi kontemporer citizenship seperti literasi digital, literasi media, dan literasi administrasi. Dari perspektif teacher capacity building, temuan ini menunjukkan pentingnya pelatihan guru yang tidak hanya fokus pada content knowledge tetapi juga pedagogical content knowledge untuk mengajarkan topik-topik kontekstual dan praktis dalam pendidikan kewarganegaraan.

Kolaborasi antara sekolah dan Disdukcapil dalam implementasi program KIA masih bersifat ad-hoc dan belum terlembaga melalui mekanisme kemitraan formal. Ketua Tim Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mengakui bahwa meskipun ada upaya koordinasi dengan sekolah melalui program jemput bola, belum ada MOU atau kesepakatan formal yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, indikator keberhasilan, dan mekanisme monitoring-evaluasi (P4). Kepala sekolah SD menyatakan bahwa komunikasi dengan Disdukcapil sering bersifat one-way, di mana sekolah hanya menerima informasi jadwal kunjungan tanpa terlibat dalam perencanaan atau evaluasi program (P8). Kondisi ini mencerminkan lemahnya institutional partnership yang seharusnya menjadi fondasi kolaborasi efektif antara sekolah dan pemerintah daerah. Literatur tentang school-community partnership (Epstein et al., 2018; Sanders, 2001) menekankan bahwa kolaborasi efektif memerlukan shared vision, clear roles and responsibilities, regular communication, dan mutual accountability, yang semuanya belum terwujud dalam kasus ini.

Persepsi Komunitas Sekolah tentang Manfaat KIA: Analisis Technology Acceptance Model

Analisis persepsi manfaat KIA di kalangan komunitas sekolah menggunakan kerangka Technology Acceptance Model menunjukkan bahwa perceived usefulness masih rendah baik di kalangan guru, orang tua siswa, maupun siswa sendiri. Orang tua siswa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak memahami perbedaan substantif antara akta kelahiran dan KIA, sehingga KIA dipandang sebagai dokumen redundan yang tidak menambah manfaat praktis (P11, P12). Kepala sekolah SMP menjelaskan bahwa ketika KIA tidak menjadi syarat wajib dalam prosedur administratif sekolah seperti pendaftaran siswa baru atau pendaftaran ujian, maka orang tua tidak melihat urgensi untuk mengurusnya (P9). Akademisi menekankan bahwa selama KIA belum terintegrasi dengan sistem layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, perceived usefulness akan tetap rendah karena tidak ada immediate benefit yang dapat dirasakan oleh masyarakat (P10).

Temuan ini memiliki resonansi kuat dengan literatur Technology Acceptance Model (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003) yang menekankan bahwa perceived usefulness merupakan prediktor terkuat dari intention to use dan actual use behavior. Dalam konteks KIA, rendahnya perceived usefulness bukan disebabkan oleh karakteristik dokumen itu sendiri, melainkan oleh belum terintegrasinya KIA dalam ekosistem layanan publik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika sekolah, rumah sakit, bank, dan institusi lainnya tidak mensyaratkan KIA dalam prosedur mereka, maka KIA tidak memiliki instrumental value yang dapat mendorong orang tua untuk mengurusnya. Dari perspektif pendidikan, sekolah dapat berperan sebagai key institution yang meningkatkan perceived usefulness KIA dengan mengintegrasikannya dalam sistem administrasi sekolah dan mengkomunikasikan manfaatnya melalui pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan.

Dimensi perceived ease of use juga menjadi faktor penting dalam konteks kepemilikan KIA. Meskipun Disdukcapil telah mengembangkan layanan jemput bola yang seharusnya memudahkan proses pembuatan KIA, orang tua siswa di wilayah terpencil melaporkan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan karena harus menyiapkan dokumen persyaratan yang kompleks dan proses verifikasi yang panjang (P11, P12). Operator kecamatan menjelaskan bahwa meskipun sistem back-end menggunakan SIAK yang terintegrasi, di tingkat front-end masih banyak prosedur manual yang membuat proses menjadi tidak user-friendly, terutama bagi masyarakat dengan literasi digital rendah (P5). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya digitalisasi, implementation gap masih signifikan, di mana teknologi yang tersedia di back-end tidak ditranslasikan menjadi kemudahan akses bagi end-user. Sekolah dapat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi proses ini, misalnya dengan menyediakan assistance kepada orang tua dalam menyiapkan dokumen atau mengakses layanan online, sehingga perceived ease of use meningkat.

Model Literasi Administrasi Kependudukan Berbasis Sekolah: Strategi Transformatif

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap praktik saat ini, hambatan struktural, dan persepsi komunitas sekolah, penelitian ini merumuskan model literasi administrasi kependudukan berbasis sekolah yang bersifat transformatif dan kontekstual. Model ini dibangun atas tiga pilar utama: integrasi kurikuler, capacity building, dan institutional partnership. Pilar pertama, integrasi kurikuler, menekankan pentingnya memasukkan literasi administrasi kependudukan sebagai topik eksplisit dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengembangkan modul pembelajaran yang kontekstual dan experiential. Pembelajaran tidak sekadar transfer informasi tentang KIA, melainkan menggunakan pendekatan transformative pedagogy yang mendorong siswa dan orang tua

untuk memahami KIA dalam konteks hak sipil, citizenship, dan akses terhadap layanan publik. Metode pembelajaran yang direkomendasikan meliputi project-based learning di mana siswa menginvestigasi prosedur pembuatan KIA, case study tentang pentingnya identitas resmi, dan service learning yang melibatkan siswa dalam kampanye sosialisasi KIA di komunitas mereka.

Pilar kedua, capacity building, fokus pada peningkatan kompetensi guru dan staf sekolah dalam literasi administrasi kependudukan melalui pelatihan terstruktur yang melibatkan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan perguruan tinggi. Pelatihan tidak hanya mencakup content knowledge tentang regulasi dan prosedur KIA, tetapi juga pedagogical content knowledge untuk mengajarkan topik ini secara efektif dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, capacity building juga mencakup pelatihan tenaga administrasi sekolah untuk dapat memfasilitasi orang tua dalam proses pengurusan KIA, termasuk asistensi digital bagi orang tua dengan literasi digital rendah. Pendekatan cascading training dapat digunakan, di mana guru-guru yang telah terlatih menjadi trainer bagi guru lain di sekolahnya, sehingga capacity building menjadi sustainable dan tidak bergantung pada sumber daya eksternal secara terus-menerus.

Pilar ketiga, institutional partnership, menekankan pelembagaan kolaborasi sekolah-Disdukcapil melalui MOU yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, indikator keberhasilan, mekanisme koordinasi regular, dan sistem monitoring-evaluasi. Partnership ini dirancang sebagai symbiotic relationship di mana sekolah mendapatkan dukungan teknis dan logistik dari Disdukcapil untuk sosialisasi dan fasilitasi KIA, sementara Disdukcapil mendapatkan akses ke captive audience (siswa dan orang tua) serta legitimasi melalui endorsement sekolah. Model partnership yang direkomendasikan adalah collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) yang menekankan shared decision-making, mutual accountability, dan continuous improvement melalui regular review meetings. Mekanisme konkrit yang dapat diimplementasikan meliputi pembentukan task force gabungan sekolah-Disdukcapil di tingkat kecamatan, penetapan school liaison officer dari Disdukcapil yang bertanggung jawab mengkoordinasikan program di sekolah-sekolah, dan pengembangan dashboard digital untuk monitoring real-time capaian kepemilikan KIA per sekolah.

Model ini juga mengintegrasikan strategi untuk mengatasi disparitas geografis melalui pendekatan differentiated support berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik sekolah. Sekolah di wilayah perkotaan dengan infrastruktur digital memadai dapat mengimplementasikan layanan semi-online di mana orang tua dapat mendaftar dan melacak status pembuatan KIA melalui aplikasi, dengan sekolah berfungsi sebagai intermediary yang memfasilitasi komunikasi dengan Disdukcapil. Sekolah di wilayah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dapat menggunakan pendekatan mobile service di mana tim gabungan sekolah-Disdukcapil melakukan kunjungan periodik dengan membawa peralatan lengkap untuk on-the-spot processing. Untuk sekolah dengan karakteristik komunitas yang memiliki literasi rendah, pendekatan peer education dapat digunakan di mana orang tua siswa yang telah berhasil mengurus KIA menjadi peer educator yang membantu orang tua lain, dengan fasilitasi dari komite sekolah. Diferensiasi strategi ini penting untuk memastikan bahwa model dapat diadaptasi sesuai konteks lokal dan tidak bersifat one-size-fits-all.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor (37,52%) tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif dan infrastruktur, tetapi juga oleh belum optimalnya peran sekolah sebagai agen literasi administrasi kependudukan. Temuan utama menunjukkan bahwa literasi administrasi kependudukan belum terintegrasi dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, kapasitas guru dalam mengajarkan topik ini masih terbatas, kolaborasi sekolah-Disdukcapil bersifat ad-hoc dan belum terlembaga, serta perceived usefulness KIA di kalangan komunitas sekolah masih rendah karena KIA belum terintegrasi

dalam sistem layanan pendidikan dan kesehatan. Disparitas geografis juga signifikan, dengan sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses lebih baik terhadap program sosialisasi dan fasilitasi KIA dibandingkan sekolah di wilayah terpencil.

Model literasi administrasi kependudukan berbasis sekolah yang dirumuskan penelitian ini menawarkan pendekatan transformatif yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan sosial dalam pemenuhan hak identitas anak. Model ini dibangun atas tiga pilar: integrasi kurikuler melalui pengembangan modul pembelajaran literasi administrasi kependudukan dalam PKn dengan pendekatan transformative pedagogy, capacity building guru dan staf sekolah melalui pelatihan terstruktur dan cascading training, serta pelembagaan partnership sekolah-Disdukcapil melalui MOU dan collaborative governance. Model ini juga mengakomodasi disparitas geografis melalui differentiated support yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik lokal sekolah. Implementasi model ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepemilikan KIA secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat civic literacy siswa dalam dimensi administrative citizenship dan membangun ekosistem kolaboratif antara sekolah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar anak secara inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan kewarganegaraan dengan memperluas konsep civic literacy untuk mencakup dimensi administrative citizenship, serta menyediakan blueprint praktis untuk kolaborasi sekolah-pemerintah dalam implementasi kebijakan publik yang berdampak pada anak. Limitasi penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada konteks Kabupaten Bogor, sehingga generalisasi temuan ke konteks lain harus dilakukan dengan hati-hati. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi implementasi model ini secara pilot di beberapa sekolah dengan karakteristik berbeda, mengevaluasi efektivitasnya menggunakan mixed-methods dengan mengukur tidak hanya capaian kepemilikan KIA tetapi juga peningkatan civic literacy siswa, serta menganalisis faktor-faktor kontekstual yang memoderasi keberhasilan model dalam setting yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, H. S., & Taylor, L. (2006). *The school leader's guide to student learning supports: New directions for addressing barriers to learning*. Corwin Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardina, P., Anderson, I., & Sariani, D. (2025). Dinamika kesadaran hukum masyarakat Rantau Rasau terkait penerapan Kartu Identitas Anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 23-30. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7616>
- Banks, J. A. (2017). Failed citizenship and transformative civic education. *Educational Researcher*, 46(7), 366-377. <https://doi.org/10.3102/0013189X17726741>
- Bennett, W. L., Wells, C., & Rank, A. (2009). Young citizens and civic learning: Two paradigms of citizenship in the digital age. *Citizenship Studies*, 13(2), 105-120. <https://doi.org/10.1080/13621020902731116>
- Budimansyah, D. (2019). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dryfoos, J. G. (1994). *Full-service schools: A revolution in health and social services for children, youth, and families*. Jossey-Bass Publishers.
- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., Van Voorhis, F. L., Martin, C. S., Thomas, B. G., Greenfeld, M. D., Hutchins, D. J., & Williams, K. J. (2018). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (4th ed.). Corwin Press.
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). Bloomsbury Academic.

- Handayani, R., Imtihan, M., & Asyari, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan layanan publik digital pemerintah daerah menggunakan pendekatan TAM. *E-Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*, 12(1), 45-56.
- Levine, P. (2011). Civic knowledge, civic engagement, and civic disposition. In J. A. Banks (Ed.), *Encyclopedia of diversity in education* (Vol. 1, pp. 384-387). SAGE Publications.
- Marlisa, S. D., & Wijaya, R. (2021). Kesadaran hukum masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto dalam memiliki Kartu Identitas Anak. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(2), 382-396. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n2.p382-396>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A. (2021). Analisis kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 123-138.
- OECD. (2020). *Going digital to advance data governance for growth and well-being*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e3d783b0-en>
- Sanders, M. G. (2001). The role of 'community' in comprehensive school, family, and community partnership programs. *The Elementary School Journal*, 102(1), 19-34. <https://doi.org/10.1086/499691>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Verástegui, M., Medina-Quintero, J. M., & Ortiz-Rodriguez, D. (2025). Determinants of citizens' intention to use e-government services: The role of perceived usefulness and ease of use. *Journal of Technology Management & Innovation*, 20(1), 101-115. <https://doi.org/10.4067/S0718-2724202500010101>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237-269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*. Widya Aksara Press.